



ASLI

BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Jakarta, 07 Agustus 2024

Kepada YTH:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

**C.q. YANG MULIA MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MEMERIKSA
DAN MENGADILI PERKARA NO.289-01-05-11/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/08/2024.**

Jalan Medan Merdeka Barat No.07 Jakarta 10110

Telp. (021) 3520173, 3520787

Di –

TEMPAT.

Perihal: **PERMOHONAN MENJADI PIHAK TERKAIT PARTAI POLITIK (PARTAI
DEMOKRAT) DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
(PHPU) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2024, DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) DKI
JAKARTA 2 UNTUK DPRD DKI JAKARTA MASA BHAKTI 2024-2029.**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

- Nama : **H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO., M.SC. M.P.A. M.A.**
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD)
Masa Bhakti 2020–2025.
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Kantor : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Jakarta
Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kodepos 10320, Telp. 021-
31907999, Fax. 021-31908999.
- Nama : **H. TEUKU RIEFKY HARSYA., B.SC. M.T.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
(DPP PD) Masa Bhakti 2020–2025.
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Kantor : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Jakarta
Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kodepos 10320, Telp. 021-
31907999, Fax. 021-31908999.

Selanjutnya disebut sebagai:-----**PIHAK TERKAIT;**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya sebagai Ketua Umum Dewan
Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Masa Bhakti 2020–2025 dan sebagai Sekretaris
Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Masa Bhakti 2020–2025, Peserta



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Pemilihan Umum Tahun 2024, Nomor Urut: 14 (empat belas), dan bertindak atas nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan (DAPIL) DKI Jakarta 2:

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Tertanggal 05 Agustus (Terlampir)** dengan ini memberi kuasa kepada:

DR. MEHBOB, SH. MH. CN.

DR. MUHAJIR, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

JIMMY HIMAWAN, SH.

NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.

MUHAMMAD MUALIMIN, SH. MH.

NASRULLAH, SH. MH.

JULIANTO ASIS, SH. MH.

DORMAULI SILALAHI, SH. MH.

CEPI HENDRAYANI, SH. MH.

H.M. RUSDI, SH. MH.

YUNUS ADHI PRABOWO, SH. MH.

Adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum yang bergabung pada "**BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI (BHPP)**" **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD)**, yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999, Email: lawmehbob@gmail.com, HP: (08161888871-082139189549). Dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang selanjutnya di sebut:-----**PIHAK TERKAIT;**

ADAPUN DASAR-DASAR DAN/ATAU ALASAN-ALASAN PARTAI DEMOKRAT MENGAJUKAN SEBAGAI PIHAK TERKAIT INI ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI) Tahun 2024, Pemohon sebagai Pihak Terkait adalah Partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut : 14 (empat belas), yaitu: Partai Demokrat;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pemohon yang dari Partai politik yaitu: Partai Demokrat (PD) selaku peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 telah mengajukan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) pada Mahkamah Konstitusi RI;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI

DEWAN PIMPINAN PUSAT

PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

3. Permohonan Pihak Terkait yang diajukan oleh:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu harus ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.
 - b. Perseorangan harus mendapat persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan.
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Nomor: 2 Tahun 2023 Tentang tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 31 ayat 2 berbunyi: "Dalam hal pengajuan Keterangan Pihak Terkait dikuasakan kepada kuasa hukum, Keterangan Pihak Terkait ditandatangani oleh kuasa hukum";
8. Bahwa dikarenakan Partai politik yaitu: Partai NasDem sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 dan juga sebagai Pemohon dalam Perkara PHPU Nomor: 289-01-05-11/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/08/2024, yang mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Minggu, Tanggal 28 Juli 2024, Pukul 17.44 WIB pada Mahkamah Konstitusi, yang mana Permohonan Pembatalan tersebut di tujukan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), akan tetapi jika Permohonan Pembatalan yang di mohonkan oleh Pemohon (Partai NasDem) tersebut di kabulkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, maka hal tersebut dapat merugikan/mempengaruhi Perolehan suara dan Perolehan kursi dari Pihak Terkait (Partai Demokrat) pada Ke-Anggotaan DPRD DKI Jakarta, Daerah Pemilihan (DAPIL) 2, Provinsi DKI Jakarta;
9. Bahwa permohonan sebagai Pihak Terkait *a quo* Kami ajukan atas adanya permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1050 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang ditetapkan pada Tanggal 28 Juli 2024, Pukul 17.44 WIB; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1060 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Tahun 2024, yang Ditetapkan Pada Tanggal 29 Juli 2024, Pukul 23.19 WIB, yang diajukan oleh Partai NasDem untuk pengisian Caleg DPRD DKI Jakarta di Dapil 2 DKI Jakarta;

10. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas, sangat beralasan hukum permohonan menjadi Pihak Terkait dikabulkan oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pemeriksa perkara *a quo*;

Demikian permohonan *aquo* Kami sampaikan kepada yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI pemeriksa perkara *aquo* atas perhatian dan perkenan serta dikabulkannya oleh yang mulia dan terhormat Mahkamah Konstitusi RI pemeriksa perkara *aquo* Kami Ucapkan terima kasih;

Hormat Kami:

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

"BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEMOKRAT (BHPP)"
"DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD)"

DR. MEHBOB, SH. MH. CN.

DR. MUHAJIR, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

JIMMY HIMAWAN, SH.

NOVIAN TO RAHMANTYO, SH. MH.

MUHAMMAD MUALIMIN, SH. MH.

NASRULLAH, SH. MH.

JULIAN TO ASIS, SH. MH.

DORMAULI SILALAH, SH. MH.

CEPI HENDRAYANI, SH. MH.

H.M. RUSDI, SH. MH.

YUNUS ADHI PRABOWO, SH. MH.